

TESIS

**“PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DARI PERKAWINAN POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B  
(Studi Kasus Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk).”**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

**“PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DARI PERKAWINAN POLIGAMI  
DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B  
(Studi Kasus Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk)**

(Arianto Ramadan, BP 20112036, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 96 hlm, 2022)

**ABSTRAK**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Itsbat nikah dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi voluntari*). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008, bahwa Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN banyak berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak- hak waris atau hak - hak lain atas kebendaan Untuk kepentingan tersebut, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus mengikuti petunjuk Buku II. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Pelaksanaan Itsbat Nikah dari Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B?, Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Nomor: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B?, Apa Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah dari Perkawinan Poligami berdasarkan Putusan Nomor: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B? Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan itsbat nikah dari perkawinan poligami berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B meskipun hakim mengabulkan permohonan tersebut atas dasar untuk mengeluarkan akta kelahiran anak, Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkawinan Poligami. Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang harus diwujudkan oleh hakim yang tidak dijalani. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Pengadilan, seharusnya dilakukan pemeliharaan kepentingan tersebut untuk melindungi penetapan anak. Atau permohonan Izin poligami di kemari yang dengan permohonan Pengesahan nikah. jika hakim berusaha untuk mengejar kepastian hukum agar anak tersebut mendapatkan akta kelahiran. Sepertinya hakim kurang mencermati Permendagri Nomor 9 tahun 2016 yang telah menjamin anak luar kawin bisa mendapatkan akat kelahirannya. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk anak bisa mendapatkan akta kelahiran dari Dukcapil dengan mencantumkan nama kedua orangtuanya dan terkait Kepentingan Kewarisan antara Pemohon II beserta anak-anaknya dan Termohon I dari Istri pertama Pemohon I memiliki hak yang sama sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Hukum Agama.

Kata Kunci: *Perkawinan Poligami, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama*

**IMPLEMENTATION OF MARRIAGE ITSBAT FROM POLYGAMY MARRIAGE  
IN PAYAKUMBUH RELIGIOUS COURT, CLASS 1B  
(Decision Case Study Number 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk)**

(Arianto Ramadan, BP 20112036, Graduate Program in Law, Faculty of Law, Andalas  
University, 96 pp., 2022)

**ABSTRACT**

Marriage describes the inner birth between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family based on the One Godhead. Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief. The Marriage Law states that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations, the Islamic Law Compilation opens the opportunity for them to submit an application for itsbat nikah (marriage determination) to the Religious Courts. Itsbat marriage can be studied in cases that do not contain elements of dispute (volunteer jurisdiction). Technical Guidelines for the Administration and Technical of the Religious Courts 2008, that marriages that are not registered by the PPN have many indications of legal smuggling to facilitate polygamy without legal procedures, and obtain inheritance rights or other rights to material. the completion of the marriage itsbat must follow the instructions of Book II. Based on this, the authors are interested in conducting research on How is the Implementation of Marriage Itsbat from Polygamous Marriages in the Payakumbuh Religious Court Class 1B? Marriage from a Polygamous Marriage based on Decision Number: 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk in the Payakumbuh Religious Court Class 1B? The writing of this thesis uses a normative legal research method that uses a literature study. From the results of the study it is known that the implementation of itsbat marriage from polygamous marriages is based on Decision Number 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk in the Payakumbuh Religious Court Class 1B even though the judge granted the determination on the basis of issuing a child's birth certificate, the judge's consideration in determining the case This is for legal certainty and benefit, but legally there are steps that are not taken. Article 3 paragraph 2 of the Marriage Law related to Polygamy Permits by the Court, an application for a new polygamy permit should be made after that only a child determination is submitted. Or the application for a polygamy permit is combined with an application for marriage validation. if the judge tries to pursue legal certainty so that the child gets a birth certificate. It seems that the judge did not pay close attention to Permendagri Number 9 of 2016 which has guaranteed that children out of wedlock can get birth certificates. Legal Consequences of Decision Number 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk children can get a birth certificate from the Dukcapil by including the names of both parents and related to the Inheritance Interests between Petitioner II and their children and Respondent I from the first wife of Petitioner I has the same rights the same in accordance with the provisions of the applicable law and in accordance with the provisions of Religious Law.

Keywords: Polygamous Marriage, Itsbat Marriage, Religious Court